

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat yang berguna untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people CarbonEthicsntered, participatory, empowerment and suistainable* (Sikwan, 2020). Pemberdayaan lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendala dan memberi masyarakat atau orang dengan kebebasan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap ide-ide, keputusan, dan tindakannya. Disisi lain pemberdayaan juga merupakan upaya dalam membangun daya dengan cara mendorong, membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bisa dikatakan juga sebagai strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat (Irawan & Tanzil, 2020).

Pemberdayaan masyarakat yaitu proses pembangunan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan juga merupakan suatu upaya membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Hidayanti, 2022). Sanger, Lasut, & Tumiwa. (2021) mengatakan pemberdayaan juga menanamkan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya seperti adanya kerja keras, adanya keterbukaan, dan bertanggung jawab yang merupakan bagian pokok dari adanya pemberdayaan. Pemberdayaan juga

memiliki tujuan yang hendak dicapai salah satunya dalam meningkatkan standar hidup masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk mempunyai potensi yang ada. Pembangunan menjadi hal yang menakutkan jika tidak diiringi dengan pembangunan kualitas manusia karena pembangunan kualitas manusia akan berorientasi juga dengan pembangunan ekonomi di daerah (Niko & Yulasteriyani, 2020).

Sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama serta mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki kebudayaan yang khas terkait bagaimana ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir disebut juga dengan masyarakat pesisir (Sanger dkk., 2021). Sebagian besar masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah pesisir berprofesi sebagai nelayan. Walaupun mata pencaharian orang-orang pesisir beragam, namun sebagian besar adalah nelayan dan kegiatan nelayan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat pesisir (Mardikanto, 2019).

Pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai upaya untuk memfasilitasi, mendorong, atau membantu agar masyarakat pesisir nantinya dapat menentukan yang terbaik bagi mereka dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir juga merupakan sebuah proses sosial yang panjang untuk mencapai tujuannya (Iswari, Luh, dan Suwena 2019).

Studi tentang pemberdayaan masyarakat pesisir sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan meninjau berbagai aspek. Misalnya Irawan dan Tanzil (2020) yang berfokus pada potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Berbeda dengan studi yang dilakukan Irawan dan Tanzil (2020), Sikwan

(2020) dalam studinya justru melihat pada aspek implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Sanger dkk (2021) yang juga melihat pada aspek ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Humairah, Arieta, & Syahdila (2022) dan Sanger dkk (2021) sama-sama melihat pemberdayaan aspek masyarakat pesisir dari aspek peningkatan ekonomi namun yang membedakannya yaitu Humairah dkk (2022) membahas mengenai aspek pengembangan potensi masyarakat pesisir melalui pengembangan ekowisata di daerah pesisir.

Pemberdayaan masyarakat pesisir saat ini menjadi fokus perhatian bersama baik oleh pemerintah maupun organisasi *Non-Governmental Organization* (NGO) atau yang biasa disebut sebagai sebuah organisasi atau lembaga non-pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan social serta keberlanjutan yang ada di wilayah pesisir tersebut. Melalui berbagai program dan inisiatif, upaya yang dilakukan secara bersama juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan keterampilan ekonomi lokal. Hal ini juga menjadi fokus Yayasan CarbonEthics sebagai NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup untuk lebih memperhatikan pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir.

Pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya daerah Tanjung Siambang yang juga dikenal dengan nama Kampung Pasir Panjang terletak di Pulau Dompok, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Effendi & Prasetyo, 2020). Daerah pesisir yang memiliki potensi laut dan pariwisata mulai dari bentang alam yang berupa pantai, dan ekosistem

*mangrove* (Effendi & Prasetyo, 2020). Saat ini beberapa daerah di Tanjung Siambang sudah mulai sulit untuk mencari ikan ataupun udang dikarenakan adanya masyarakat yang menebang tumbuhan *mangrove* sembarangan yang pada akhirnya itu menyebabkan hilangnya tempat tinggal hewan laut yang bergantung hidup pada tumbuhan *mangrove* sekaligus menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat pesisir di Tanjung Siambang, Dompak (Putri, Arieta, dan Hairi, 2023).

Yayasan CarboneEthics memilih Tanjung Siambang untuk diberikan solusi terhadap masalah dan mengimplementasikannya dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang 90% nya adalah nelayan kantor Lurah Dompak yang kemudian menjadi sebuah kelompok Petani Pesisir Dompak Laut (PPDL) dan masyarakat lokal untuk dapat bekerjasama melakukan restorasi dan konservasi pada ekosistem *mangrove*, yang akan menjadikan ini sebagai potensi dari ekosistem ini agar terus tersedia dan memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar Tanjung Siambang (Horista & Rahayu, 2022). Hutan *mangrove* juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kawasan *mangrove* (Rahman dkk., 2023)

Luas kawasannya di Tanjung Siambang  $\pm 4.280$  Ha memainkan peran yang sangat krusial dalam pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan ekosistem *mangrove* yang luas, maka potensi ekonomi dan sosial masyarakat dapat ditingkatkan (Humairah dkk., 2022). Jumlah ekosistem *mangrove* di Pulau Dompak sebesar 26,76% dari luas total ekosistem *mangrove* yang ada di Tanjungpinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau luas sebaran ekosistem *mangrove* memiliki ketebalan yang bervariasi mulai dari 42m hingga 173m dengan

persentase tutupan hutan *mangrove* yang bervariasi dari 71% hingga yang tertinggi 81% (Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, 2019). Selain luasnya ekosistem *mangrove* yang ada, pulau ini didukung juga dengan potensi lainnya yaitu pantai yang membentang di Pulau Dompak, salah satu pantai yang terkenal adalah Pantai Tanjung Siambang yang saat ini dikelola oleh masyarakat pesisir di sekitar pantai dibawah pengawasan Yayasan CarbonEthics Indonesia.

Potensi Tanjung Siambang Pulau Dompak yang besar ini membawa Yayasan CarbonEthics Indonesia yang merupakan organisasi non-profit dan fokus pada konservasi lingkungan serta pengembangan, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sebuah program yaitu *Mangrove Rehabilitation In Bintan* yang berfokus di Pulau Dompak. Hal ini didasarkan pada keadaan yang dialami oleh ekosistem *mangrove* yang mengalami degradasi dari waktu ke waktu karena pemanfaatan yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek kelestarian ekosistem *mangrove* yang mengakibatkan ekosistem laut menjadi sulit terutama untuk masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan (Humairah dkk., 2022)

Berdasarkan tinjauan dari studi-studi sebelumnya, peneliti melihat masih ada celah kekosongan pengetahuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut, terutama pada aspek ekonomi. Untuk itu, peneliti ingin meninjau bagaimana program pemberdayaan masyarakat pesisir ini mampu memberikan akses mata pencaharian alternatif bagi masyarakat Pulau Dompak, khususnya masyarakat Tanjung Siambang.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mata

pencapaian alternatif penting untuk menciptakan keberagaman ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penelitian untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang di paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Dompok Sebagai Mata Pencapaian Alternatif Oleh Yayasan CarbonEthics Indonesia.

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, adapun suatu pertanyaan yang dapat di kemukakan dalam penelitian ini melalui pertimbangan dari permasalahan yang muncul yaitu “Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Yayasan CarbonEthics Indonesia dapat membentuk akses mata pencapaian alternatif di masyarakat pesisir Pulau Dompok?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah “Untuk mendeskripsikan dinamika pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau Dompok dalam membentuk akses mata pencapaian alternatif oleh Yayasan CarbonEthics Indonesia”.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

### 1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan keilmuan dan referensi tentang pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mata pencaharian alternatif

### 1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran kepada masyarakat pesisir dan *stakeholder* mengenai program pemberdayaan yang dilakukan di wilayah pesisir dalam menghadapi tantangan maupun kesulitan yang sering terjadi di masyarakat pesisir. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi pada masyarakat terkait program pemberdayaan di masyarakat dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat pesisir.